

## **PERAN PENDIDIKAN POLITIK DALAM PEMBENTUKAN KARAKTERISTIK MASYARAKAT**

Muhammad Fakhri Ramadhan<sup>1</sup>, Muhammad Sirozi<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang,

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang,

<sup>1</sup>fakhrimfr22@gmail.com, <sup>2</sup>msirozi@gmail.com ,

### **ABSTRACT**

*Political education is a process of deriving the basic values and norms of a country's ideology which is carried out consciously, organized and planned and continues continuously from one generation to the next in order to build the nation's character. Politics plays an important role in shaping the values and behavior adopted by society, both through public policy, leadership and public discourse. The role of politics in forming the characteristics of society, among others: (1) political education shapes the political personality of the community, (2) political education shapes the political awareness of the community, (3) political education shapes the political participation of the community. This research is library research which is qualitative in nature. The aim of political education is as a medium for conveying political concepts which has the ultimate goal of making citizens more politically literate and aware of their rights and obligations so that they can participate in the life of the nation and state in every development process. Apart from that, it also provides guidance to Indonesia's young generation to increase awareness of national and state life. Political education as a means of increasing national and state awareness has a legal basis that adheres firmly to the philosophy and personality of the Indonesian nation, which plays a very large role in shaping the characteristics of society, including the following: (1) political education forms the political personality of society, (2) political education shapes people's political awareness, (3) political education shapes people's political participation.*

*Keywords: the role of political education, community character*

### **ABSTRAK**

Pendidikan politik merupakan proses penurunan nilai-nilai dan norma-norma dasar dari ideologi suatu negara yang dilakukan dengan sadar, terorganisir, dan berencana serta berlangsung kontinyu dari satu generasi kepada generasi berikutnya dalam rangka membangun watak bangsa. Politik memainkan peran penting dalam membentuk nilai-nilai dan perilaku yang dianut oleh masyarakat, baik melalui kebijakan publik, kepemimpinan, maupun wacana publik. Peran politik dalam pembentukan karakteristik masyarakat, antara lain: (1) pendidikan politik membentuk kepribadian berpolitik masyarakat, (2) pendidikan politik membentuk kesadaran berpolitik masyarakat, (3) pendidikan politik membentuk partisipasi berpolitik masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat kualitatif. Tujuan pendidikan politik sebagai media penyampaian konsep politik yang memiliki tujuan akhir untuk membuat warga negara menjadi lebih melek politik yang sadar akan hak dan kewajiban sehingga dapat ikut serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam setiap proses

pembangunan. Selain itu juga memberikan pedoman kepada generasi muda Indonesia guna meningkatkan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan politik sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara memiliki landasan hukum yang berpegang teguh pada falsafah dan kepribadian bangsa Indonesia mempunyai peran yang sangat besar dalam pembentukan karakteristik masyarakat, antara lain sebagai berikut: (1) pendidikan politik membentuk kepribadian berpolitik masyarakat, (2) pendidikan politik membentuk kesadaran berpolitik masyarakat, (3) pendidikan politik membentuk partisipasi berpolitik masyarakat

Kata Kunci: peran pendidikan politik, karakter masyarakat

### **A. Pendahuluan**

Pembangunan karakter bangsa merupakan kebutuhan mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada awal kemerdekaan, para *founding father* negeri ini telah bertekad untuk menjadikan pembangunan karakter bangsa sebagai sesuatu yang urgen dan tidak bisa lepas dari pembangunan nasional. Politik memiliki peran penting dalam membentuk karakter masyarakat. Kebijakan, program, dan keputusan yang dibuat oleh pemimpin politik dapat mempengaruhi nilai, sikap, dan perilaku masyarakat. Dalam membentuk karakter masyarakat, politik saling berinteraksi dengan faktor-faktor lain seperti ekonomi, budaya, dan agama. Namun, politik tetap memainkan peran penting dalam membentuk nilai-nilai dan perilaku yang dianut oleh masyarakat, baik

melalui kebijakan publik, kepemimpinan, maupun wacana publik.

Politik pada umumnya adalah sebuah fenomena yang mana selalu berkaitan dengan manusia yang kuadratnya selalu berhubungan dengan masyarakat berbangsa dan bernegara. Manusia merupakan makhluk sosial yang dinamis dan selalu berkembang yang mana perkembangan manusia ini selalu menyesuaikan terhadap keadaan di sekitarnya. Sebagai anggota bermasyarakat yang bernegara baik itu personal ataupun kelompok pastinya terikat oleh yang namanya aturan-aturan atau norma yang berlaku, yang mana aturan atau norma tersebut telah ditetapkan oleh negaranya tersebut. Dan memiliki nilai-nilai dasar atau ketetapan politik yang harus diterima oleh masyarakat itu sendiri. Politik memiliki sebuah

sistem yang mana sistem tersebut dinamakan sebagai sistem ketatanegaraan yang telah disepakati dalam upaya mengantarkan sebuah bangsa menuju cita-cita seluruh rakyat. Sistem ketatanegaraan ini juga merupakan sistem yang mengatur segala kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.

Pendidikan politik dalam UU No. 2 tahun 2008 pada BAB I Pasal 1 ayat 4 diharapkan dapat membentuk warga negara yang berkepribadian utuh, berketerampilan, sekaligus juga berkesadaran yang tinggi sebagai warga negara yang baik (*good citizen*), sadar akan hak dan kewajiban serta memiliki tanggung jawab yang dilandasi oleh nilai-nilai yang berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Proses pencapaian tujuan pendidikan politik tersebut tidak dapat dilihat secara langsung namun memerlukan waktu yang cukup lama, hal ini disebabkan karena pendidikan politik berhubungan dengan aspek sikap dan perilaku seseorang.

Pendidikan politik merupakan proses penurunan nilai-nilai dan norma-norma dasar dari ideologi suatu negara yang dilakukan dengan sadar, terorganisir, dan berencana

dan berlangsung kontinyu dari satu generasi kepada generasi berikutnya dalam rangka membangun watak bangsa (*national character building*). Nilai-nilai yang dimaksud adalah nilai-nilai dan moral Pancasila (Azis Wahab, 1996: 6), yang menjadi cerminan hati nurani dan sifat khas karakteristik bangsa. Nilai ini berasal dari kodrat budaya dan menjadi milik seluruh rakyat. Hal ini tercermin dalam watak, kepribadian, sikap, dan tingkah laku bangsa Indonesia. Masyarakat telah menyadari, salah satu penyebab utama tersendat-sendatnya proses reformasi untuk mewujudkan Indonesia yang demokratis adalah kurang terdidiknya mayoritas warga negara secara politik, akibat proses pembodohan politik yang dilakukan secara sistematis oleh pemerintahan Orde Baru. Kurang terdidiknya warga negara secara politik ini, telah menyebabkan mereka cenderung pasif dan mudah dimobilisasi untuk kepentingan pribadi/ jabatan dari para elite politik. Lebih dari itu, mereka juga tidak bisa ikut mempengaruhi secara signifikan proses-proses pengambilan keputusan yang berkaitan erat dengan kehidupan mereka. Padahal, sudah menjadi rahasia umum bahwa demokratisasi yang sehat

mensyaratkan adanya partisipasi politik yang otonom dari warga negara. Menurut Amien Rais (Ruslan, 2000: iii), partisipasi politik yang benar dan otonom ini, hanya dapat dimungkinkan jika warga negara cukup terdidik dan terprogram sehingga muncul kesadaran, peningkatan wawasan, dan penajaman kepekaan politik. Untuk menumbuhkan dan atau meningkatkan partisipasi politik yang otonom dari setiap warga negara, maka pelaksanaan pendidikan politik yang baik dan benar, mutlak diperlukan. Pelaksanaan pendidikan politik ini, selain dapat dilakukan oleh pemerintah melalui lembaga-lembaga pendidikan formal yang ada, juga bisa dilaksanakan secara non-formal oleh organisasi-organisasi masyarakat sipil.

Makalah ini akan mengkaji bagaimana peran pendidikan politik dapat membentuk karakteristik masyarakat melalui kajian kepustakaan dengan sumber data dari buku, jurnal, buletin, artikel, dan karya-karya ilmiah lain yang relevan.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library*

*research*) yang bersifat kualitatif. *Library research* adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, informasi, dan berbagai macam data-data lainnya yang terdapat dalam kepustakaan (Subagyo, 1991:109).

Sumber data merupakan objek untuk menghasilkan data. Karena sifatnya adalah kajian pustaka, maka objek yang dapat dijadikan sumber adalah buku, jurnal, buletin, artikel, dan karya-karya ilmiah lain yang relevan.

Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Dokumentasi merupakan satu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, maupun elektronik (Sukmadinata, 2011:221). Cara untuk mengolah atau menganalisis data menggunakan teknik *content analysis* (kajian isi). Secara metodologis, teknik ini mencoba menawarkan asumsi-asumsi epistemologis terhadap pemahaman yang tidak hanya berfokus pada analisis teks tetapi juga menekankan konteks yang melingkupinya serta kontekstualisasinya dalam masa yang berbeda. Menurut Guba dan Lincoln,

kajian isi adalah teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan dan dilakukan secara objektif dan sistematis (Moleong, 2016: 220).

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Pengertian Politik**

Kata politik berasal dari kata Yunani *polis, politicos* (warga negara), *politicos* (kewarganegaraan). Di negara-kota zaman Yunani, orang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai kemakmuran dalam hidup mereka (Aristoteles). Ketika orang mencoba untuk menentukan posisinya dalam masyarakat, mencapai kesejahteraan pribadi melalui sarana yang ada, atau membujuk orang lain untuk menerima pandangan mereka, mereka terlibat dalam aktivitas yang disebut politik (Sahya, 2013: 3).

Secara umum dapat dikatakan bahwa politik (*politics*) adalah usaha untuk menetapkan aturan-aturan yang dapat diterima oleh mayoritas warga negara guna menggiring masyarakat menuju hidup berdampingan secara harmonis. Berjuang untuk kehidupan yang baik mencakup berbagai kegiatan, termasuk definisi tujuan

yang sistematis dan cara untuk mencapai tujuan tersebut (Budiarjo, 2008:15).

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) definisi politik setidaknya memiliki tiga pengertian. Pengertian pertama adalah "pengetahuan tentang ketatanegaraan atau pemerintahan negara (seperti dalam sistem pemerintahan, dasar pemerintahan)". Definisi lain adalah "semua masalah dan tindakan (kebijakan, taktik, dll.) yang mempengaruhi pemerintahan suatu negara atau negara lain." Pengertian ketiga adalah "bagaimana bersikap (dalam menangani atau menghadapi suatu masalah).

Menurut Plato, politik adalah seni mengatur masyarakat untuk mencapai kebaikan bersama (The Republic). Aristoteles dalam karyanya menyatakan politik bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang baik bagi warga negara. Gramsci (1971) mengemukakan konsep hegemoni, di mana kelas yang berkuasa menerapkan ideologi dan nilai mereka pada masyarakat untuk mempertahankan dominasi. Foucault (1991) menjelaskan bagaimana kekuasaan politik menghasilkan subjek yang patuh melalui mekanisme disiplin dan normalisasi.

Definisi politik menurut Gabriel A. Almond et.al, yaitu kegiatan yang berhubungan dengan kendali pembuatan keputusan publik dalam masyarakat tertentu di wilayah tertentu, dimana kendali ini disokong melalui instrumen yang sifatnya otoritatif (berwenang secara sah) dan koersif (bersifat memaksa). Politik mengacu pada penggunaan instrumen otoritatif dan koersif ini siapa yang berhak menggunakannya dan dengan tujuan apa.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan politik adalah pengetahuan tentang ketatanegaraan atau pemerintahan negara yang dibuat, dipelihara, dan di gunakan untuk masyarakat untuk menegakkan peraturan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri.

### **Pengertian Pendidikan Politik**

Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya, bahwa pendidikan dan politik memiliki makna yang berbeda namun saling bahu-membahu dalam proses pembentukan karakteristik masyarakat. Kata politik sebenarnya berasal dari bahasa Yunani; *politikos*, yang berarti dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga negara.

Berdasarkan penjelasan ini, dapat dikembangkan pengertian politik sebagai proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik. Sedangkan pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan manusia untuk mencerdaskan manusia lain melalui pengajaran, pelatihan dan penelitian. Dari penjelasan kedua istilah tersebut di atas dapat dirumuskan bahwa pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ramlan Surbakti dalam bukunya yang berjudul memahami ilmu politik mengemukakan bahwa pendidikan politik dan sosialisasi politik memiliki kesamaan dalam istilah. Dalam bahasa Inggris kedua istilah ini memang sering disamakan. Istilah *political socialization* jika diartikan secara harfiah ke dalam bahasa Indonesia akan bermakna sosialisasi politik. Oleh karena itu, dengan

menggunakan istilah *political socialization* banyak yang mensinonimkan istilah pendidikan politik dengan istilah Sosialisasi Politik, karena keduanya memiliki makna yang hampir sama. Dengan kata lain, sosialisasi politik adalah pendidikan politik dalam arti sempit. Melalui proses sosialisasi politik para anggota masyarakat dapat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat. Atau dengan kata lain, di dalam pendidikan politik terjadi proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan politik dalam tulisan ini dipahami sebagai perbuatan memberi latihan, ajaran, serta bimbingan untuk mengembangkan kapasitas dan potensi diri manusia, melalui proses dialogik yang dilakukan dengan suka rela antara pemberi dan penerima pesan secara rutin, sehingga para penerima pesan dapat memiliki kesadaran berdemokrasi dalam kehidupan bernegara. Hal ini dimaksudkan agar dapat mewujudkan kesadaran dan partisipasi berdemokrasi dalam kehidupan

bernegara. Definisi pendidikan politik ini mengandung tiga anasir penting, yakni: Pertama, adanya perbuatan memberi latihan, ajaran, serta bimbingan untuk mengembangkan kapasitas dan potensi diri manusia. Kedua, perbuatan di maksud harus melalui proses dialogik yang dilakukan dengan suka rela antara pemberi dan penerima pesan secara rutin. Ketiga, perbuatan tersebut ditujukan untuk para penerima pesan dapat memiliki kesadaran berdemokrasi dalam kehidupan bernegara. Pemahaman di atas pada dasarnya menunjukkan bahwa Pelaksanaan pendidikan politik harus dilakukan tanpa unsur paksaan dengan fokus penekanan pada upaya untuk mengembangkan pengetahuan (Kognisi), menumbuhkan nilai dan keberpihakan (Afeksi) dan mewujudkan kecakapan (Psikomotorik) warga sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok.

### **Tujuan Pendidikan Politik**

Pendidikan politik dapat dikatakan sebagai media penyampaian konsep politik yang memiliki tujuan akhir untuk membuat warga negara menjadi lebih melek. Warga negara yang melek politik adalah warga negara yang sadar akan

hak dan kewajiban sehingga dapat ikut serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam setiap proses pembangunan. Pendidikan politik diperlukan keberadaannya terutama untuk mendidik generasi muda saat ini yang nantinya akan menjadi generasi penerus bangsa. Instruksi Presiden (Inpres) No. 12 tahun 1982 tentang pendidikan politik bagi generasi muda menyatakan bahwa tujuan pendidikan politik adalah memberikan pedoman kepada generasi muda Indonesia guna meningkatkan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan tujuan pendidikan politik lainnya ialah menciptakan generasi muda Indonesia yang sadar akan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai salah satu usaha untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya. Berdasarkan pemaparan tentang tujuan pendidikan politik di atas, penulis berpendapat bahwa yang menjadi tujuan utama dari pendidikan politik adalah agar generasi muda saat ini memiliki kemampuan untuk memahami situasi sosial politik penuh konflik. Aktifitas yang dilakukan pun diarahkan pada proses demokratisasi serta berani bersikap kritis terhadap kondisi

masyarakat di lingkungannya. Pendidikan politik mengajarkan mereka untuk mampu mengembangkan semua bakat dan kemampuannya dalam aspek kognitif, wawasan kritis, sikap positif, dan keterampilan politik. Kesemua itu dirancang agar mereka dapat mengaktualisasikan diri dengan jalan ikut berpartisipasi secara aktif dalam bidang politik. Singkat kata pendidikan politik dapat membentuk kepribadian, kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

### **Peran Politik dalam Pembentukan Karakteristik Masyarakat**

Pendidikan politik sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara memiliki landasan hukum yang berpegang teguh pada falsafah dan kepribadian bangsa Indonesia mempunyai peran yang sangat besar dalam pembentukan karakteristik masyarakat, antara lain sebagai berikut.

#### **1. Pendidikan Politik Membentuk Kepribadian Berpolitik Masyarakat**

Pendidikan politik adalah aktifitas yang bertujuan untuk membentuk dan

menumbuhkan orientasi-orientasi politik pada individu. Ia meliputi keyakinan konsep yang memiliki muatan politis, meliputi juga loyalitas dan perasaan politik, serta pengetahuan dan wawasan politik yang menyebabkan seseorang memiliki kesadaran terhadap persoalan politik dan sikap politik. 124 Inpres No. 12 Tahun 1982 tentang Pendidikan Politik mengisyaratkan akan pembentukan kepribadian seseorang melalui pendidikan politik. Di sana dijelaskan bahwa kaum muda dalam perkembangannya berada dalam proses pembangunan dan modernisasi dengan segala akibat sampingannya yang bisa mempengaruhi proses pendewasaannya sehingga apabila tidak memperoleh arah yang jelas maka corak dan warna masa depan negara dan bangsa akan menjadi lain daripada yang dicita-citakan. Perkembangan zaman yang terasa sangat cepat jika tidak dibarengi dengan wawasan berpikir yang luas hanya akan membawa generasi muda bangsa ini ke dalam kehidupan yang lepas kendali. Oleh karena itu, pendidikan politik diperlukan sebagai filter terhadap segala pengaruh buruk yang mungkin

datang. Pembentukan kepribadian politik dilakukan melalui metode tak langsung, yaitu pelatihan dan sosialisasi, serta metode langsung berupa pengajaran politik dan sejenisnya.

## **2. Pendidikan Politik Membentuk Kesadaran Berpolitik Masyarakat**

Kualitas demokrasi Indonesia tercermin dalam kedewasaan dan kesadaran dalam berpolitik. Menurut Surbakti kesadaran politik adalah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara<sup>109</sup>. Tingkat kesadaran politik diartikan sebagai tanda bahwa warga masyarakat menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan dan atau pembangunan. Terdapat dua variabel penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang, salah satu variabel tersebut adalah kesadaran politik. Apabila individu memiliki kesadaran politik maka individu tersebut akan memiliki kesadaran akan posisi dirinya dalam sebuah tatanan kehidupan bernegara. Selain sadar akan posisinya, ia juga akan menaruh perhatian terhadap proses-proses politik dan pemerintahan yang berlangsung.

Perhatian tersebut seperti dengan mengikuti perkembangan informasi politik dan pemerintahan terkini atau bahkan terlibat langsung dalam proses tersebut. Wujud dari kesadaran politik salah satunya bentuknya adalah partisipasi politik dalam pemilu. Partisipasi politik yang dilandasi oleh kesadaran politik akan mendorong individu menggunakan hak pilihnya secara rasional. Untuk menumbuhkan kesadaran politik ditempuh melalui metode dialog dan pengajaran langsung kepada masyarakat.

### **3. Pendidikan Politik Membentuk Partisipasi Berpolitik Masyarakat**

Partisipasi politik masyarakat sangat berhubungan erat dengan kesadaran politik. Partisipasi politik tanpa kesadaran politik itu bisa saja terjadi. Seorang pemilih bisa saja hanya menggunakan hak pilihnya, namun sebenarnya dia hanya asal memilih tanpa sebuah kesadaran akan akibat lanjut dari pilihannya. Sebaliknya, partisipasi politik yang dilandasi oleh kesadaran politik akan menghasilkan pilihan yang baik dan sesuai dengan aspirasi yang bersangkutan. Dia sungguh menyadari akan tanggung

jawabnya sebagai warga negara yang menentukan masa depan bangsa. Partisipasi politik dapat terwujud dengan keikutsertaan individu-individu secara sukarela dalam kehidupan politik masyarakatnya. Selain itu pembinaan politik dapat dilakukan melalui aktivitas pembinaan pemikiran berdasarkan kaidah-kaidah tertentu. Pemikiran itu haruslah pemikiran yang mendasar dan menyeluruh yang mampu memancarkan sistem hidup, atau biasa disebut dengan ideologi. Dengan begitu, masyarakat akan memiliki gambaran yang jelas tentang sistem hidup yang akan diterapkan, dan siapa yang pantas untuk menjalankannya. Kesadaran politik akan memunculkan peran aktif masyarakat dalam meningkatkan mutu kehidupan dengan melakukan pengawasan ketat atas kebijakan penguasa. Apalagi jika hal ini dilandasi oleh kesadaran atas hubungannya dengan Tuhan yang mewajibkannya untuk memikirkan urusan masyarakat. Tidak akan ada hambatan dan ancaman yang akan menghentikannya. Tidak akan ada bujukan, rayuan yang akan memalingkannya. Maka terciptalah social control yang berasal dari *people*

*power* yang cerdas dan bermoral. Dalam kondisi seperti ini, perubahan dari kehidupan 'gelap' menuju 'terang' tinggal menunggu waktu. Dari masyarakat seperti ini juga akan lahir pemimpin-pemimpin yang mumpuni dan amanah yang siap untuk mengambil alih kepemimpinan mewujudkan kehidupan damai, sejahtera, adil dan beradab.

### **E. Kesimpulan**

Secara umum dapat dikatakan bahwa politik (*politics*) adalah usaha untuk menetapkan aturan-aturan yang dapat diterima oleh mayoritas warga negara guna menggiring masyarakat menuju hidup berdampingan secara harmonis. Politik adalah pengetahuan tentang ketatanegaraan atau pemerintahan negara yang dibuat, dipelihara, dan digunakan untuk masyarakat untuk menegakkan peraturan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tujuan pendidikan politik sebagai media penyampaian konsep politik yang memiliki tujuan akhir untuk

membuat warga negara menjadi lebih melek politik yang sadar akan hak dan kewajiban sehingga dapat ikut serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam setiap proses pembangunan. Selain itu juga memberikan pedoman kepada generasi muda Indonesia guna meningkatkan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan tujuan pendidikan politik lainnya ialah menciptakan generasi muda Indonesia yang sadar akan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai salah satu usaha untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya.

Pendidikan politik sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara memiliki landasan hukum yang berpegang teguh pada falsafah dan kepribadian bangsa Indonesia mempunyai peran yang sangat besar dalam pembentukan karakteristik masyarakat, antara lain sebagai berikut: (1) pendidikan politik membentuk kepribadian berpolitik masyarakat, (2) pendidikan politik membentuk kesadaran berpolitik masyarakat, (3) pendidikan politik

membentuk partisipasi berpolitik masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adriono. 2010. Pendidikan Karakter Kumpulan Pengalaman Inspirasi. Jakarta: Kemendiknas RI.
- Anggara, Sahya. 2013. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Anonim. 2010. *Desain Induk Pembangunan Karakter Bangsa Tahun 2010-2025*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Bashori, K. (2018). Pendidikan politik di era disrupsi. Sukma: Jurnal Pendidikan, 2(2), 287-310.
- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Budimansyah, D. 2009. Membangun Karakter Bangsa di Tengah Arus Globalisasi dan Gerakan Demokrasi. Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar dalam bidang Sosiologi Kewarganegaraan pada Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial di Universitas Pendidikan Indonesia. 14 Mei 2009.
- Elisabeth, S. 2016. Peranan Partai Politik Dalam Memberikan Pendidikan Politik yang Berkarakter Terhadap Masyarakat. Jurnal Ilmiah Research Sains, 2(1).
- Kartono, K. 1996. Pendidikan Politik. Bandung: Mandar Maju.
- Kharisma, D. (2015). Peran Pendidikan Politik Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Muda. Politico: Jurnal Ilmu Politik, 1(7), 1144
- Moleong, Lexy J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Nadir, N., & Wardani, W. Y. 2019. Membangun Pendidikan Politik Dalam Fatsun Demokrasi Pancasila Dan Deliberative. The Journal of Society and Media, 3(1), 126-141.
- Putra, M. H. 2019. Character Education Through The Civilization Nations Children. The Kalimantan Social Studies, 1(1), 12-17.
- Ruslan, Utsman Abd. Mu'iz. 2000. Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin, Studi Analisis Evaluatif terhadap Proses Pendidikan Politik "Ikhwan" untuk para Anggota Khususnya, dan Seluruh Masyarakat Mesir Umumnya, dari tahun 1928 hingga 1954. Solo: Era Intermedia.
- Sarnoto, A. Z. 2013. Konsepsi politik pendidikan di Indonesia. Educhild: Pendidikan dan Sosial, 1(1), 30-40.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2011. Metode Pendidikan. Bandung: Kerjasama UI dan remaja Rosdakarya.
- Sumantri, Endang. 2010. Membangun Nasionalisme Melalui Pendidikan. [www.setneg.go.id](http://www.setneg.go.id).
- Surono (edit.). 2010. Nasionalisme dan Pembangunan Karakter

- Bangsa. Yogyakarta: PSP-Press. Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Wahab, A. Azis. 1996. Politik Pendidikan dan Pendidikan Politik: Model Pendidikan Kewarganegaraan Indonesia Menuju Warganegara Global. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Pendidikan pada Jurusan Pendidikan Moral Pancasila, Kewarganegaraan dan Hukum Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial di IKIP Bandung, 18 Oktober 1996.
- Yudi Rusfiana dan Ismail Nurdin. 2017. *Dinamika Politik Kontemporer*. Bandung: Alfabeta.